

**RENCANA PROGRAM KERJA JANGKA MENENGAH
KABUPATEN KLUNGKUNG
TAHUN 2020-2024**

KATA PENGANTAR

Rencana Program Kinerja Jangka Menengah (Renproja) Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Klungkung adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat program dan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah hukum BNN Kabupaten Klungkung. Rencana Program Kinerja Jangka Menengah (Renproja) BNN Kabupaten Klungkung tahun 2020-2024 digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan seluruh unit kerja dilingkungan BNN Kabupaten Klungkung dalam kurun waktu 5 tahun yaitu tahun 2020-2024.

Penyusunan Rencana Program Kinerja Jangka Menengah (Renproja) BNN Kabupaten Klungkung tahun 2020-2024 dilakukan dengan melaksanakan pegkajian terlebih dahulu terhadap kondisi riil, evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian rencana strategis BNNK Klungkung. Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Program Kinerja Jangka Menengah (Renproja) BNNK Klungkung Tahun 2020-2024.

Kepala BNN Kabupaten

Klungkung



I Made Pastika, SH, MH

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Klungkung (BNNK Klungkung) sebagai instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang berada di Kabupaten Klungkung dibentuk berdasarkan surat pernyataan Bupati Klungkung Nomor : 060/681/Kesbangpol tertanggal 20 November 2017 yang berisi dukungan dari Pemerintah Kabupaten Klungkung terhadap pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Klungkung. Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Klungkung yang pada saat itu diketuai oleh Wakil Bupati Klungkung, I Made Kasta, merupakan cikal bakal berdirinya Badan Narkotika Nasional Kabupaten Klungkung. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Klungkung diresmikan pada tanggal 29 April 2018 oleh Sekretaris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Drs. Adhi Prawoto, S.H. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Klungkung memiliki 4 bagian yaitu Sub. Bagian Umum, Seksi Pemberantasan, Seksi Rehabilitasi, Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat yang fokus utamanya adalah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika. BNNK Klungkung memiliki visi Mewujudkan masyarakat Klungkung yang sehat, bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan misi bersama instansi pemerintah, swasta, dan komponen masyarakat Kabupaten Klungkung melaksanakan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.

Gambaran kondisi umum, potensi dan permasalahan pembangunan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di

wilayah Kabupaten Klungkung dipaparkan berdasarkan hasil pencapaian program periode sebelumnya, kondisi lingkungan strategis, dan perkembangan kondisi terbaru lainnya. Potensi dan permasalahan pembangunan P4GN akan menjadi input dalam menentukan arah kebijakan dan strategi BNNK Klungkung pada periode 2020-2024. Kinerja pencegahan dan pemberantasan terhadap kejahatan dan pelanggaran hukum baik berupa kejahatan penyalahgunaan maupun kejahatan peredaran gelap narkoba, sebagaimana menjadi mandat konstitusional keberadaan BNNK Klungkung, merupakan wujud pengejawantahan kehadiran negara di daerah dalam memberikan perlindungan terhadap warga negaranya untuk tidak menjadi korban maupun pelaku kejahatan narkoba. Dalam kaitan tersebut, kinerja BNNK Klungkung akan selalu dihubungkan dengan angka prevalansi penyalahgunaan narkoba yang menunjukkan atau menggambarkan situasi penyalahgunaan narkoba yang sedang terjadi saat ini. Adapun data-data yang dapat disajikan adalah sebagai berikut :

A. Data Kasus Tindak Pidana Narkoba

Berdasarkan pada letak geografis wilayah Kabupaten Klungkung, akses untuk memasuki wilayah Kabupaten Klungkung dapat melalui jalur darat dan laut. Kabupaten Klungkung merupakan Kabupaten yang memiliki tiga pulau kecil yang termasuk dalam wilayah kecamatan Nusa Penida yaitu Pulau Nusa Penida, Pulau Lembongan dan Pulau Ceningan. Sebagai Kabupaten yang memiliki kepulauan maka Kabupaten Klungkung memiliki akses masuk melalui jalur perairan. Kondisi geografis tersebut menyebabkan tingkat kerawanan peredaran gelap narkoba di Kabupaten Klungkung menjadi tinggi. Data Kasus

Tindak Pidana Narkotika di wilayah Kabupaten Klungkung sejak Tahun 2018 sampai Tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Data Kasus Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Klungkung

No	Tahun	Jumlah Tersangka	Tersangka		Usia (Tahun)				
			Penyalah-guna	Pengedar /Kurir	18 s.d 20	21 s.d 30	31 s.d 40	41 s.d 50	>50
1	2018	17	14	3	4	3	5	3	1
2	2019	29	20	7	5	12	8	4	
3	2020	33	20	13	4	19	7	2	1

Dalam tabel diatas terlihat bahwa angka penyalahguna lebih tinggi daripada angka pengedar atau kurir, hal ini disebabkan karena wilayah kabupaten Klungkung yang mudah diakses dan memiliki banyak jalur masuk menyebabkan Kabupaten Klungkung menjadi daerah persinggahan bagi pengedar Narkotika untuk memperluas jaringan dengan cara meningkatkan jumlah pengguna dengan rentang usia antara 21-30 Tahun sehingga permintaan atas barang narkotika menjadi meningkat. Dengan demikian maka jaringan peredaran gelap narkotika menjadi lebih luas.

B. Data Penyalahguna Narkoba yang Lapor Diri atau Voluntary

Penyalahguna narkoba yang lapor diri atau voluntary merupakan penyalahguna narkotika yang secara sadar melaporkan diri ke lembaga rehabilitasi untuk mendapat fasilitas rehabilitasi. Penyalahguna narkotika yang melapor diri ke lembaga rehabilitasi baik lembaga rehabilitasi pemerintah maupun lembaga rehabilitasi masyarakat di wilayah kabupaten Klungkung sejak tahun 2019 sampai saat ini sejumlah 16 (enam

belas) orang yang terdiri dari 15 (lima belas) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan.

C. Data Fasilitas Layanan Rehabilitasi (LRIP dan LRKM)

LRIP atau Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah adalah Lembaga Rehabilitasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah yang meliputi rumah sakit umum, rumah sakit khusus meliputi rumah sakit jiwa dan rumah sakit ketergantungan obat, puskesmas, klinik, panti rehabilitasi, balai atau loka rehabilitasi dan lembaga pemasyarakatan dan balai permasyarakatan. Pada tahun 2019 terdapat 1 (satu) LRIP di Kabupaten Klungkung yaitu RSUD Klungkung, kemudian mengalami peningkatan pada Tahun 2020 yakni terdapat 2 LRIP yaitu BNNK Klungkung dan RSUD Klungkung.

LRKM atau Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat merupakan Lembaga Rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat meliputi Lembaga Rehabilitasi Sosial, rumah sakit swasta dan klinik swasta. LRKM di wilayah Kabupaten Klungkung pada tahun 2020 terdapat 1 LRKM yaitu RSUD Permata Hati.

D. Data fasilitas IPWL (kategori aktif atau tidak).

IPWL atau Institusi Penerima Wajib Laport adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah. IPWL di Kabupaten Klungkung sampai saat ini masih nihil.

E. Data penyalah guna narkoba yang telah mendapat layanan rehabilitasi.

Data penyalahguna yang telah mendapat layanan rehabilitasi tahun 2019 terdiri dari 8 org laki-laki. Tahun 2020 terdiri dari 4 orang laki-laki dan 1 org perempuan, dengan jumlah total 5 orang. Tahun 2021 terdapat 5 orang laki-laki yang mendapatkan

fasilitas rehabilitasi. Data penyalahguna narkoba yang telah mendapat layanan rehabilitasi dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Data Klien Rehabilitasi Di Kabupaten Klungkung

Tahun	Jumlah		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
2019	8	-	8
2020	4	1	5
2021	5	-	5

F. Data Penghuni Lapas Kasus Penyalahgunaan Narkoba

Berdasarkan hasil koordinasi dengan Rumah Tahanan Klas IIB Klungkung, diperoleh data bahwa saat ini terdapat 5 (lima) orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang masih menjalani hukuman yang telah memperoleh vonis hakim sebagai penyalahguna narkoba di Rumah Tahanan Klas IIB Klungkung. Jumlah tersebut merupakan jumlah WBP yang kasusnya telah memiliki kekuatan hukum tetap (putusan sudah Inkrah) dan diputus sebagai penyalahguna narkoba. Sedangkan dalam hal kasus narkoba yang masih dalam proses atau belum memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai penyalahguna narkoba masih dalam status sebagai tahanan sehingga belum dapat dikategorikan sebagai WBP penyalahguna narkoba.

G. Data dan informasi kondisi demografi kewilayahan, sekolah dan Perguruan Tinggi.

Kabupaten Klungkung merupakan Kabupaten yang paling kecil dari 9 (sembilan) Kabupaten dan Kodya di Bali. Kabupaten Klungkung berbatasan dengan Kabupaten Bangli disebelah Utara, Kabupaten Karangasem disebelah Timur, Kabupaten Gianyar disebelah Barat, dan berbatasan langsung dengan Samudra

Hindia disebelah Selatan. Kabupaten Klungkung merupakan Kabupaten yang memiliki wilayah kepulauan yaitu Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Lembongan dan dan pulau Nusa Ceningan. Kabupaten Klungkung memiliki 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Klungkung, Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Dawan, dan Kecamatan Nusa Penida. Kabupaten Klungkung memiliki 6 (enam) pelabuhan tradisional yakni Pelabuhan banjar Bias, Pelabuhan Tribuana, Pelabuhan Gunaksa, Pelabuhan Nusa Penida, Pelabuhan Sampalan dan Dermaga Banjar Nyuh.

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung yang kemudian dilakukan analisa dan pengkajian, jumlah sekolah di Kabupaten Klungkung dapat digambarkan dalam Tabel Berikut:

No	Kecamatan	Kategori	Jumlah	Total
1	Klungkung	SD	30	45
		SMP	5	
		SMA/SMK	10	
2	Dawan	SD	23	27
		SMP	3	
		SMA/SMK	1	
3	Banjarangkan	SD	32	38
		SMP	5	
		SMA/SMK	1	
4	Nusa Penida	SD	53	69
		SMP	10	
		SMA/SMK	6	

Selain sekolah-sekolah tersebut, di Kabupaten Klungkung terdapat beberapa lembaga Pendidikan diantaranya Stikes Panca atma Jaya, Bahamas Maritime School, dan Liberty International College.

H. Data SDM BNN Di Wilayah Kabupaten Klungkung

Jumlah Pegawai BNN Kabupaten Klungkung adalah 18 (delapan belas) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang Polri, 4 (empat) orang ASN Organik BNN, dan 11 (sebelas) orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri. Kondisi SDM pada BNNK Klungkung dapat digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3. Data Pegawai BNN Kabupaten Klungkung Tahun 2021

No.	Jabatan	Kategori	Pendidikan	Keterangan
1	Kepala Satuan Kerja	Polri	Strata-2	1 Orang
2	Kasubbag Umum	ASN	Strata-1	1 Orang
3	Kasi Rehabilitasi	Polri	Strata-1	1 Orang
4	Bendahara	ASN	Diploma-3	1 Orang
5	Penyuluh Narkoba	ASN	Strata-1	1 Orang
6	Penyidik BNN	ASN	Strata-1	1 Orang
7	Analisis Intelijen	Polri	SMA	1 Orang
8	Dokter Klinik	PPNPN	Strata-1	1 Orang
9	Perawat	PPNPN	Diploma 3	2 Orang
10	Pramubakti	PPNPN	Strata-1	3 Orang
11	Pengemudi	PPNPN	Strata-1 dan SMA	2 Orang
12	Satpam	PPNPN	SMA/SMK	3 Orang

I. Data Sarana Prasarana Perkantoran

Sampai saat ini Gedung kantor BNNK Klungkung masih berstatus pinjam pakai. Selain gedung kantor terdapat beberapa sarana dan prasarana perkantoran yang berstatus pinjam pakai diantaranya Meja dan kursi kerja pejabat Eselon III dan IV, Meja rapat, Lemari penyimpanan dan sofa. Adapun Barang-barang yang masuk dalam Database BMN di BNNK Klungkung sebagaimana terlampir dalam Lampiran IV dokumen ini.

J. Sarana Klinik Pratama BNNK Klungkung

Terdapat beberapa alat kesehatan dalam Klinik Pratama BNNK Klungkung yang dapat dilihat dalam Tabel berikut :

No	Nama barang	Jumlah
1	Stetoscope	3
	Tensimeter	2
	Tabung oksigen	1
	Lemari Obat (kaca)	1
	Ultrasonic Nebulizer	1 buah
	Glucometer Complete with Glucostic	1
	Timbangan badan	1
	Termometer	1
	Digital thermometer	1
	Alat Kesehatan Umum Lainnya	3
	Alat Kedokteran Umum Lainnya	1
	Personal Computer	1

K. Senjata Api

Di BNNK Klungkung saat ini terdapat 1 (satu) Buah Senjata api jenis Scorpion Evo 3 Kal 9 x 21 mm yang saat ini disimpan dalam lemari penyimpanan senjata yang berada di ruang Kasi Pemberantasan BNNK Klungkung.

L. Data Kondisi Capaian Dan Evaluasi Kinerja Periode Sebelumnya

Penyerapan tahun 2019 mencapai 99,41 % dengan capaian output 100%. Dan Tahun 2020 penyerapan sebesar 98,03% dengan capaian output sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya penyebaran	Persentase masyarakat yang	7%	5.5 %	78,5 %

P4GN	terpapar informasi P4GN			
Meningkatnya kebijakan Institusi/Lembaga yang responsive dalam penanganan permasalahan narkoba	Jumlah Institusi/Lembaga yang responsif terhadap kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba	2 Institusi/ lembaga	3 Institusi/ lembaga	150%
Terselenggaranya penguatan kapasitas pada institusi dan lingkungan masyarakat dalam upaya penanganan narkoba	Jumlah Instansi/ lingkungan yang turut berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Anti Narkoba	2 Institusi/ lingkungan	1 Institusi/ lingkungan	50%
Terselenggaranya pelayanan rehabilitasi narkoba pada fasilitas rehabilitasi instansi pemerintah yang memadai	Jumlah fasilitas Rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional	1 Fasilitas	1 Fasilitas	100%
Terselenggaranya pelayanan rehabilitasi narkoba pada fasilitas rehabilitasi komponen masyarakat yang memadai	Jumlah fasilitas rehabilitasi milik komponen masyarakat yang operasional	1 Fasilitas	0 Fasilitas	0
Meningkatnya pengungkapan Tindak Pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas Tindak Pidana Narkotika yang diselesaikan (P21)	1 Berkas Perkara	1 Berkas Perkara	100
Terselenggaranya proses manajemen kinerja yang efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	88	83,81	95,23

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1. Potensi

Berdasarkan analisa kondisi lingkungan strategis terkait berbagai permasalahan narkoba di wilayah Kabupaten Klungkung, terdapat sejumlah potensi baik secara internal maupun eksternal organisasi BNN Kabupaten Klungkung yang dapat dikelola dan dioptimalisasi. Berbagai potensi tersebut adalah:

a. Regulasi daerah

Bupati Klungkung melalui Perda Kabupaten Klungkung terkait Ketertiban Umum, mengajak para pemilik kafe remang-remang untuk menyamakan persepsi dalam penutupan kafe remang-remang yang tidak berijin dan lokasi galian C. Kebijakan tersebut menjadi dasar ditutupnya tempat hiburan malam di wilayah Kabupaten Klungkung sehingga saat ini Kabupaten Klungkung Nihil Tempat Hiburan Malam.

Beberapa desa di Kabupaten Klungkung telah menuangkan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dalam regulasi daerah yang disebut Pararem anti Narkoba. Pararem Anti Narkoba merupakan peraturan masing-masing desa yang memuat tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta Pararem Anti Narkoba juga memuat ketentuan mengenai sanksi yang akan dijatuhkan kepada masyarakat (warga desa setempat) yang terbukti melakukan tindak pidana narkotika.

b. Dukungan anggaran

BNNK Klungkung dalam melaksanakan kegiatan P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika) memperoleh dukungan anggaran dari BNN RI sesuai dengan Pagu Alokasi yang telah ditentukan setiap tahunnya. Dukungan anggaran tersebut akan dikelola dan dioptimalisasi oleh BNNK Klungkung baik dalam rangka

melaksanakan P4GN maupun sebagai dukungan manajemen dan kinerja dalam rangka pelaksanaan layanan perkantoran.

c. Kerjasama dan Sinergi Lintas Sektor

Berdasarkan Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi P4GN, maka BNNK Klungkung bekerja sama dengan berbagai stakeholder terkait diantaranya Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung, Polres Klungkung, Kejaksaan Negeri Klungkung, Pengadilan Negeri Semarapura, Rumah Tahanan Klas IIB Klungkung, RSUD Klungkung, RS Permata Hati, Kepala Desa dan Camat Se-Kabupaten Klungkung dalam mewujudkan Klungkung Bersih Narkoba. Sinergi lintas sektor di kabupaten Klungkung sudah berjalan dengan baik dan BNNK Klungkung selalu berusaha dengan optimal untuk terus menjaga kerjasama yang sudah terjalin.

d. Komitmen kepastian penegakan hukum narkoba

BNNK Klungkung bersama dengan Polres Klungkung, Kejaksaan Negeri Klungkung, Pengadilan Negeri Semarapura dan Rumah Tahanan Klas IIB Klungkung berkomitmen untuk menegakan hukum narkoba di wilayah Kabupaten Klungkung. Sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana, BNNK Klungkung selalu berkoordinasi dengan instansi terkait dalam menangani kasus tindak pidana narkoba.

e. Ketersediaan fasilitas dan layanan rehabilitasi

BNNK Klungkung memiliki Klinik Pratama BNNK Klungkung yang memiliki Program Rehabilitasi Rawat jalan secara gratis. Selain Klinik Pratama BNNK Klungkung, di Kabupaten Klungkung juga terdapat fasilitas rehabilitasi milik pemerintah yang lain yaitu RSUD Klungkung dan RS Permata Hati. Pada Tahun 2020 BNNK Klungkung membentuk sebuah Unit IBM (Intervensi Berbasis Masyarakat) yang terketak di desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, kabupaten Klungkung. Sebagai wujud dukungan terhadap unit IBM tersebut, BNNK

Klungkung melaksanakan pelatihan dan pembinaan terhadap petugas IBM agar diperoleh SDM yang berkompeten dalam mengoperasikan fasilitas rehabilitasi khususnya dalam memberikan layanan rehabilitasi kepada masyarakat yang memilih IBM sebagai tempat rehabilitasi.

f. Sumber daya aparatur BNN

BNNK Klungkung selalu berusaha optimal dalam melaksanakan P4GN meskipun dengan jumlah personil yang terbatas dan masih jauh dibawah jumlah yang ditentukan dalam DSP. Karena keterbatasan personil tersebut, BNNK Klungkung selalu berkoordinasi dengan instansi terkait guna menjalankan amanat Presiden sebagaimana tertuang dalam Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi P4GN.

g. Budaya dan kearifan Lokal

Beberapa desa di Kabupaten Klungkung telah menuangkan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dalam regulasi daerah yang disebut Pararem Anti Narkoba. Pararem Anti Narkoba merupakan peraturan masing-masing desa yang memuat tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta Pararem Anti Narkoba juga memuat ketentuan mengenai sanksi yang akan dijatuhkan kepada masyarakat (warga desa setempat) yang terbukti melakukan tindak pidana narkoba.

2. Permasalahan

Terdapat sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan prioritas penanganan oleh BNN Kabupaten Klungkung, dimana permasalahan-permasalahan ini dapat menjadi hambatan dalam upaya pencapaian tujuan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah Kabupaten Klungkung, adapun sejumlah permasalahan tersebut adalah:

- a. Keterbatasan personil BNNK Klungkung;
- b. Keterbatasan sarana dan prasarana di BNNK Klungkung;
- c. Terkendala pandemi COVID-19 sehingga kegiatan turun ke langsung ke lapangan menjadi terbatas;
- d. Terbatasnya pengetahuan masyarakat terkait fasilitas rehabilitasi milik instansi masyarakat;
- e. Tingkat kepatuhan terhadap Rencana Penarikan Dana yang masih harus terus ditingkatkan dikarenakan adanya Pandemi COVID-19 sehingga pelaksanaan beberapa kegiatan sempat mengalami penundaan;
- f. Terdapat kendala teknis di lapangan terkait dengan sinergitas antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program P4GN mengakibatkan penyerapan anggaran tidak dapat dilakukan secara optimal.

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL

A. TUJUAN ORGANISASI

Tujuan Organisasi BNN sebagaimana disebutkan dalam Renstra 2020-2024 terdiri dari 2 tujuan, yakni:

1. Melindungi dan Menyelamatkan Masyarakat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. Sasaran strategis dari tujuan tersebut adalah meningkatnya penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Tujuan dan sasaran strategis tersebut dalam rangka mewujudkan masyarakat yang merasa terlindungi dan terselamatkan dari bahaya ancaman narkoba. Dalam hal ini, upaya penguatan ketahanan masyarakat harus terus ditingkatkan. Selain itu pengintegrasian upaya pencegahan dan pemberantasan sangat penting untuk terus ditingkatkan dalam rangka melemahkan pasar terutama dari sisi supply, melalui tindakan penangkapan dan pemberantasan jaringan pasar narkoba, pengungkapan jaringan dan penyitaan barang bukti beserta aset tersangka peredaran gelap narkoba.

2. Mewujudkan Transformasi Layanan Publik yang Berkualitas. Sasaran strategis dari tujuan tersebut adalah terwujudnya manajemen organisasi yang profesional, produktif, dan proporsional serta berkinerja tinggi.

Tujuan dan sasaran strategis ini merepresentasikan fokus kinerja kelembagaan BNN yang berorientasi pada hasil kinerja yang dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Penguatan kelembagaan yang profesional dan berkinerja tinggi ini akan memberikan wajah transformatif kelembagaan yang berdampak terhadap peningkatan pelayanan publik di lingkungan BNN. Tujuan dan sasaran strategis tersebut merupakan fokus yang harus dicapai BNN bersama seluruh perangkat organisasinya baik

tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Dalam hal ini, BNN Kabupaten Klungkung sebagai salah satu unit organisasi BNN berkewajiban mengerahkan seluruh sumber daya dan kekuatannya untuk mencapai target organisasi yang telah ditetapkan.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL

Kebijakan dan strategi operasional BNN Kabupaten Klungkung merupakan rumusan penjabaran dari kebijakan dan strategi BNN. Kebijakan dan strategi BNN tahun 2020-2024 adalah:

1. penguatan pengawasan jalur penyelundupan narkoba;
2. peningkatan kualitas penindakan kejahatan narkoba;
3. pembangunan ketahanan dan pemberdayaan masyarakat;
4. peningkatan kapabilitas rehabilitasi;
5. penguatan sinergi dan kolaborasi stakeholder.

Kebijakan dan strategi BNN yang bersifat makro tersebut dispesifikasi dan disesuaikan dengan kondisi aktual permasalahan narkoba yang terjadi di wilayah Kabupaten Klungkung. Selain itu, dalam rumusan Kebijakan dan strategi BNN Kabupaten Klungkung juga menyelaraskan dengan kebijakan BNN yang berorientasi pada penguatan pelaksanaan P4GN dan peningkatan kapasitas organisasi BNN.

Dalam hal ini, kebijakan dan strategi yang dirumuskan BNN Kabupaten/Kota sifatnya sangat kontekstual dan sesuai dengan kondisi dan karakteristik kewilayahan. Adapun kebijakan dan strategi operasional BNN Kabupaten Klungkung sebagai berikut:

1. Penguatan regulasi daerah dan pengelolaan sumberdaya pembangunan daerah yang responsif terhadap permasalahan narkoba.
2. Penguatan koordinasi dan kerjasama lintas instansi dalam rangka pengawasan jalur pintu masuk atau perbatasan lintas Negara.

3. Peningkatan pertukaran informasi dan data kejahatan narkoba dalam upaya pemetaan dan pengungkapan jaringan sindikat narkoba.
4. Penguatan koordinasi kepastian penegakan hukum narkoba.
5. Peningkatan pembinaan dan penguatan simpul-simpul komunitas dan jaringan sosial kemasyarakatan.
6. Pembangunan literasi pendidikan anti narkoba berbasis digital.
7. Penguatan kolaborasi lintas stakeholder dalam penyediaan pelayanan rehabilitasi yang memenuhi standar.
8. Penguatan kolaborasi program pembangunan daerah berbasis kawasan dan ekonomi kerakyatan.

Dan lain lain.

BAB III

RENCANA KINERJA DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

A. RENCANA KINERJA

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Klungkung menetapkan rencana kinerja sesuai dengan konstruksi struktur kinerja BNN periode 2020-2024. Desain rencana kinerja BNN Kabupaten Klungkung menggunakan pendekatan cascading kinerja sebagai penjabaran dari sejumlah kinerja kegiatan yang dimandatkan ke unit kerja BNN Kabupaten/Kota. Terkait penetapan rencana target kinerja BNN Kabupaten/Kota sudah termasuk rencana target kinerja unit kerja BNN Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Kabupaten/Kota. Dengan demikian, rencana target kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Program Kerja Jangka Menengah BNN Kabupaten/Kota merupakan gambaran dan proyeksi rencana target kinerja pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah Kabupaten/Kota. Adapun rencana target kinerja BNN Kabupaten Klungkung Tahun 2020-2024 disajikan dalam bentuk lampiran matrik rencana kinerja.

B. RENCANA KEBUTUHAN PENDANAAN

Rencana kebutuhan pendanaan seluruh unit kerja BNN di Kabupaten Klungkung tahun 2020-2024 sebesar Rp. 2.805.948.500, yang tersebar di unit kerja BNN Kabupaten/Kota. Rencana kebutuhan pendanaan tersebut difokuskan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan BNN baik di bidang pencegahan dan pemberdayaan, pemberantasan dan rehabilitasi. Selain itu, rencana kebutuhan pendanaan juga untuk mendukung operasional rutin perkantoran.

Adapun rencana kebutuhan pendanaan seluruh unit kerja BNN di Kabupaten Klungkung tahun 2020-2024 secara detail disajikan dalam bentuk lampiran matrik rencana kebutuhan pendanaan.

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Rencana Program Kerja Jangka Menengah BNN Kabupaten Klungkung Tahun 2020-2024 merupakan dokumen penjabaran rencana strategis BNN 2020-2024 dan Rencana Program Kerja Jangka Menengah Provinsi Bali. Dalam dokumen Rencana Program Kerja Jangka Menengah BNN Kabupaten Klungkung Tahun 2020-2024 telah menggambarkan desain rencana program kerja dan struktur kinerja seluruh aparatur BNN Kabupaten Klungkung secara hirarkis sesuai ruang lingkup tugas dan kewenangan.

Lampiran
Matrik Rencana Kinerja
Badan Narkotika Nasional Kabupaten Klungkung
Tahun 2020-2024

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Angka Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	-	51.00	51.00	51.25	51.25
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Angka Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	-	78.67	78.67	78.75	78.75
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Angka Indeks Kemandirian Partisipasi		2.80	2.80	2.85	2.85
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi	-	-	-	-	-
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	-	1 lembaga	1 lembaga	2 lembaga	2 lembaga
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	-	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
			Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNK	-	3.2	3.2	3.2	3.2

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
6.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	-	1 berkas	1 berkas	2 berkas	2 berkas
9.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika						
7.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNNK	-	90	90	91	91
8.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai IKPA BNNK	-	94	94	95	95

**) Indikator Kinerja yang dimandatkan pada beberapa BNN Kabupaten/Kota*

Lampiran
Matrik Rencana Kebutuhan Pendanaan
Badan Narkotika Nasional Kabupaten Klungkung
Tahun 2020-2024

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Angka Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	19.106.000	77.170.000	74.000.000	77.700.000	81.400.000
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Angka Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	29.740.000	65.000.000	120.000.000	126.000.000	132.000.000
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Angka Indeks Kemandirian Partisipasi	127,465,000	266.781.000	222.195.000	233.304.750	224.416.000
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi	-	-	-	-	-

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
		berkelanjutan						
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	2.530.000	60.615.000	72.295.000	75.909.750	79.524.500
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM					
			Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNK					
6.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	40.000.000	25.800.000	35.000.000	40.000.000	40.000.000
9.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba						

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
7.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNNK	650.000	35.478.000	39.280.000	41.244.000	43.208.000
8.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai IKPA BNNK	59.533.000	60.790.000	84.358.000	88.575.000	92.793.000

**) Indikator Kinerja yang dimandatkan pada beberapa BNN Kabupaten/Kota*

Lampiran
Matrik Output dan Rencana Komponen/Sub Komponen
Badan Narkotika Nasional Kabupaten Klungkung
Tahun 2020-2024

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN/SUB KOMPONEN
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Angka Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	SMP dan SMU Sederajat yang Memperoleh Pengembangan <i>Soft Skill</i>	
			Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika yang Terbentuk	Informasi dan Edukasi Melalui Pemanfaatan Media Cetak
				Dialog Interaktif Remaja
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Angka Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba
				Koordinasi Dalam Rangka Pengayaan Refrensi Advokasi di BNNP
				Fasilitasi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba
			Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber daya Desa	Intervensi Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Angka Indeks Kemandirian Partisipasi	Advokasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba	Rapat Kerja Teknis BNNP dan BNNK Dalam Upaya Sinkronisasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN/SUB KOMPONEN
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi	Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika	
			Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Tanaman Terlarang	
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	1. Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional 2. Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNK	Lembaga rehabilitasi yang operasional	Bimbingan Teknis Fasilitas Rehabilitasi Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten/Kota Operasional Klinik/Fasilitas Rehabilitasi Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM)	Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang terbentuk	Rapat Koordinasi IBM Pemetaan
			Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional	Pembentukan dan Operasional Unit IBM Operasional Unit IBM Asistensi
6.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika	Penyelidikan Kasus Tindak Pidana Narkotika Penyidikan Kasus Tindak Pidana Narkotika
7.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana	Nilai Kinerja Anggaran BNNK	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Koordinasi Penyusunan RKA
			Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN/SUB KOMPONEN
	Program dan Anggaran BNN			Koordinasi Penyusunan Laporan
8.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Nilai IKPA BNNK	Layanan Manajemen Keuangan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi
			Layanan Perkantoran	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Operasional Perkantoran